

# Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Kota Depok

Andini Sephia Surya Utami<sup>1</sup>, Fauzy Putra Sukaten<sup>2</sup>, Fariz Maulana Noorend<sup>3</sup>, M. Reza Al Hafizh<sup>4</sup>,  
Wawang Yusdiman<sup>5</sup>, Saridawati<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Bina Sarana Informatika  
Jl. Kramat Raya No 98, Jakarta Pusat, Indonesia

e-mail korespondensi: saridawati.sti@bsi.ac.id

Informasi Artikel: Submit: 29-05-2024 | Revisi : 05-06-2024 | Terima : 07-06-2024

**Abstrak** - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah perencanaan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara periodik, APBD dibuat berkala setiap tahun. APBD berisikan Program Kerja dan Rencana Kegiatan yang disusun bersama menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam melaksanakan APBD, Pemerintah harus mengoptimalkan penggunaannya dengan tujuan utama adalah mencapai kesejahteraan masyarakat daerah. Perubahan dalam realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, baik peningkatan maupun penurunan, dapat dievaluasi menggunakan analisis varian pendapatan, analisis varian pertumbuhan pendapatan, rasio efektivitas pendapatan asli daerah, varian belanja, analisis pertumbuhan belanja, dan rasio efisiensi belanja. Dalam artikel ini, kami akan membahas tentang APBD Kota Depok untuk periode 2020 – 2022 yang datanya didapat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

**Kata Kunci** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Efektifitas Pendapatan, Efisiensi Belanja.

**Abstracts** - *The Regional Revenue and Expenditure Budget or APBD is a financial plan made by the local government together with the Regional People's Representative Council (DPRD). Periodically, the APBD is prepared annually. The APBD contains Work Programs and Activity Plans that are jointly formulated in accordance with the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD). In implementing the APBD, the Government must optimize its use with the main goal of achieving the welfare of the local community. Changes in the realization of regional revenue and expenditure budgets, both increases and decreases, can be evaluated using revenue variance analysis, revenue growth variance analysis, original regional revenue effectiveness ratio, expenditure variance, expenditure growth analysis, and expenditure efficiency ratio. In this article, we will discuss the APBD of Depok City for the period 2020 - 2022, with data obtained from the Report on the Realization of Regional Revenue and Expenditure Budget of Depok City..*

**Keywords:** *Regional Revenue and Expenditure Budget, Revenue Effectiveness, Expenditure Efficiency.*

## 1. Pendahuluan

Saat ini, akuntansi sektor publik di Indonesia berkembang dengan sangat pesat, terutama dengan adanya era baru dalam pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan dan kesejahteraan suatu daerah. Efektivitas dalam pengelolaan keuangan dapat menentukan apakah suatu daerah menjadi kuat dan mandiri atau justru sebaliknya, menjadi lemah dan tidak berdaya. Oleh karena itu, cara daerah mengelola sumber daya keuangannya menjadi faktor kunci dalam menentukan nasib dan keberlanjutannya. (Setiani & Nurul Madila, 2019)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD selalu menjadi indikator kemajuan Pemerintah Daerah dalam membangun wilayahnya. Pertumbuhan pembangunan, baik dalam hal ekonomi maupun infrastruktur, merupakan sasaran utama dari APBD itu sendiri. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan anggaran belanja guna menjaga stabilitas pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah tanpa bergantung pada bantuan eksternal atau pihak ketiga. Dengan kata lain, total pengeluaran tidak boleh melebihi total pendapatan (surplus). Penyusunan anggaran dalam pembiayaan di suatu instansi adalah salah satu elemen penting untuk mencapai hasil yang optimal. Maka dari itu sebuah instansi pemerintah memerlukan pimpinan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mengelola instansi dengan baik dan memastikan tercapai tujuan serta sasaran pembangunan secara efektif. Salah satu alat bantu yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). (Shaladin Hernandi et al., 2022)



Menyusun dan menyiapkan laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip penting. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. (Keuangan & Nomor, 2023) Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, instansi diberikan otonomi atau kewenangan untuk mengurus keuangannya sendiri. Hal ini memungkinkan pemerintah menjalankan fungsinya dengan efektif dan memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan pengeluaran di sektor publik. (Rasyid, 2014)

Laporan Realisasi Anggaran adalah komponen integral dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran dalam konteks pemerintahan memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencakup beberapa jenis, seperti: pendapatan, transfer, belanja, surplus atau defisit, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan netto, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIPKA). Laporan Realisasi Anggaran memperlihatkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Keterkaitan antara anggaran dan realisasi tersebut penting untuk menunjukkan sejauh mana pencapaian target-target yang telah disepakati antara lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan ketentuan hukum. Laporan Realisasi Anggaran memperlihatkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pentingnya perbandingan tersebut adalah untuk menunjukkan sejauh mana pencapaian target-target yang telah disepakati antara lembaga legislatif dan eksekutif sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, untuk mengetahui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Depok, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis pendapatan dan belanja. Secara keseluruhan, gambaran mengenai pendapatan dan belanja daerah Kota Depok dapat diperoleh melalui laporan realisasi anggaran. Melalui laporan tersebut, kita dapat mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan oleh Kota Depok. (BPK, 2010)

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, diperlukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan fokus pada Analisis Varian Pendapatan, Pertumbuhan Pendapatan, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Varian Belanja, Pertumbuhan Belanja Daerah, dan Efisiensi Belanja.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian yang terstruktur dan terencana dengan jelas, dimulai dari perencanaan hingga desain penelitian. Dalam penelitian ini, Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Depok pada periode 2020-2022.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif dengan analisa kuantitatif. Melibatkan penggunaan statistik deskriptif untuk memberikan gambaran atau deskripsi objek yang diteliti melalui sampel atau populasi. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan karakteristik dari suatu variabel atau lebih secara mandiri, tanpa melakukan perbandingan atau mengaitkannya dengan variabel lain. Metode ini berfokus pada pemahaman dan penjelasan nilai dari variabel-variabel tersebut sebagaimana adanya, baik ketika berfokus pada satu variabel tunggal maupun beberapa variabel yang bersifat independen.

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis Laporan Realisasi Anggaran adalah dengan menggunakan Varian Pendapatan dan Belanja Daerah, (Mahmudi & Sallama, 2010):

1. Analisis Varian Anggaran Pendapatan (Selisih)

$$\text{Analisa Varian Belanja} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun } (t)}{\text{Anggaran Pendapatan Tahun } (t)} \times 100\% \quad (1)$$

2. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan Pendapatan Tahun } (t) = \frac{\text{Pendapatan Tahun } (t) - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)} \times 100\% \quad (2)$$

3. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\% \quad (3)$$

Kemampuan dalam memperoleh PAD dianggap efektif jika rasio ini mencapai minimal 1 atau 100%, (Halim, 2012). Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kemampuan daerah dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Anshori, 2019)

**Tabel 1. Kriteria Penilaian Efektifitas PAD**

Kriteria Efektivitas	Rasio Efektifitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

4. Analisis Varian Belanja

$$\text{Analisa Varian Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } (t)}{\text{Anggaran Belanja Tahun } (t)} \times 100\% \quad (4)$$

5. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } (t) = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } (t) - \text{Realisasi Belanja Tahun } (t - 1)}{\text{Realisasi Belanja Tahun } (t - 1)} \times 100\% \quad (5)$$

6. Analisis Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Belanja Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Semakin kecil rasio efisiensi, semakin baik kinerja pemerintahan daerah. (Halim, 2012), nilai efisiensi yang diperoleh dari perbandingan tersebut kemudian diukur dengan kriteria kinerjanya dan dibandingkan dari tahun ke tahun.(Anshori, 2019)

**Tabel 2. Kriterion Efisiensi Keuangan Daerah**

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
Efisiensi	<100%
Efisiensi Berimbang	=100%
Tidak Efisiensi	>100%

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Analisis Varian Pendapatan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan yang lebih besar. Kemandirian keuangan yang lebih tinggi berarti bahwa pemerintah daerah tidak akan terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana transfer. (Mahmudi & Sallama, 2010)

Analisis Varian (selisih) Anggaran Pendapatan menggambarkan kemampuan suatu pemerintah dalam merealisasikan pendapatan tanpa melebihi jumlah yang dianggarkan. Hasil dari perhitungan varian pendapatan daerah adalah:

**Tabel 3. Perhitungan Varian Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 - 2022**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	Presentase (%)
2020	Rp. 3,121,095,250,056.00	Rp. 3,236,277,806,392.00	(Rp. 115,182,556,336.00)	103.69
2021	Rp. 3,219,626,075,377.00	Rp. 3,396,023,758,232.00	(Rp. 176,397,682,855.00)	105.48
2022	Rp. 3,594,168,043,335.00	Rp. 3,664,656,173,029.00	(Rp. 70,488,129,694.00)	101.96
Rata - Rata Pendapatan				103.71

Berdasarkan tabel 3, selisih realisasi pendapatan Kota Depok menunjukkan tren sebagai berikut:

- Pada tahun 2020 sebesar (Rp. 115.182.556.336,00) atau 103,69%
- Pada tahun 2021 sebesar (Rp. 176.397.682.855,00) atau 105,48%
- Pada tahun 2022 sebesar (Rp. 70.488.129.694,00) atau 101,96%.

### 3.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Analisis Pertumbuhan Pendapatan berguna untuk mengetahui apakah kinerja anggaran pemerintah daerah, dalam satu tahun anggaran atau selama beberapa periode anggaran, mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Berikut adalah hasil dari perhitungan pertumbuhan pendapatan:

Tabel 4. Perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 - 2022

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)		Pertumbuhan (%)
2020	Rp	3,236,277,806,392.00	
2021	Rp	3,396,023,758,232.00	4.94
2022	Rp	3,664,656,173,029.00	7.91
		Rata - Rata	6.42

Berdasarkan tabel 4, pertumbuhan pendapatan di Kota Depok selama tahun anggaran 2020-2022 mengalami peningkatan yang positif. Pertumbuhan pendapatan daerah dari tahun 2020 ke 2021 tercatat sebesar 4,94%. Pada tahun 2022, pertumbuhan pendapatan daerah meningkat lebih lanjut, mencapai 7,91%.

### 3.3 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan PAD yang telah dianggarkan. Berikut adalah hasil perhitungan rasio efektivitas Pemerintah Daerah Kota Depok yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Perhitungan Tingkat Efektivitas PAD Kota Depok Tahun Anggaran 2020 - 2022

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Presentase (%)	Kriteria
2020	Rp. 1,138,499,654,711.00	Rp. 1,293,003,769,037.00	113.57	sangat efektif
2021	Rp. 1,349,600,629,760.00	Rp. 1,536,968,635,023.00	113.88	sangat efektif
2022	Rp. 1,543,043,505,869.00	Rp. 1,642,228,601,282.00	106.43	sangat efektif
Rata - Rata			111.29	sangat efektif

Berdasarkan tabel 5, diketahui bahwa rasio efektivitas PAD Kota Depok pada tahun 2020 adalah 113,57%. Pada tahun 2021, rasio ini mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,31% menjadi 113,88%. Namun, pada tahun 2022, rasio efektivitas PAD mengalami penurunan sebesar 7,46% menjadi 106,43% dan masih masuk dalam kriteria sangat efektif.

### 3.4 Analisis Varian Belanja

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran, mulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. (Lembaran et al., 2024)

Analisis varian belanja adalah analisis yang membandingkan perbedaan antara realisasi belanja dan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan analisis varian belanja untuk Daerah Kota Depok dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Perhitungan Varian Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 - 2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Varian/Selisih (Rp)	presentase (%)
2020	Rp 3,786,740,736,807.00	Rp 3,231,267,376,079.00	(Rp 555,473,360,728.00)	85.33
2021	Rp 3,676,759,990,653.00	Rp 3,267,620,863,110.00	(Rp 409,139,127,543.00)	88.87
2022	Rp 4,085,789,603,733.00	Rp 3,614,127,822,783.00	(Rp 471,661,780,950.00)	88.46
Rata - Rata Belanja				87.55

Berdasarkan tabel 6, analisis varian belanja daerah menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pemerintah daerah Kota Depok menggunakan sebesar 85,33% dari jumlah yang dianggarkan. Pada tahun 2021, persentase penggunaan anggaran meningkat menjadi 88,87%, dan pada tahun 2022, sedikit turun menjadi 88,46% dari jumlah yang dianggarkan.

### 3.5 Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja daerah bertujuan untuk memahami apakah belanja mengalami peningkatan atau penurunan dari tahun ke tahun. Hasil dari perhitungan pertumbuhan belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Perhitungan Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2020 - 2022

Tahun	Realisasi Belanja	Rasio Pertumbuhan Belanja (%)
2020	Rp 3,231,267,376,079.00	
2021	Rp 3,267,620,863,110.00	1.13
2022	Rp 3,614,127,822,783.00	10.60
Rata - Rata		5.86

Berdasarkan tabel 7, terlihat bahwa pertumbuhan belanja mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, pertumbuhan belanja rata-rata sebesar 1,13%, sementara pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang lebih signifikan sebesar 9,48%, dengan total pertumbuhan belanja rata-rata sebesar 10,60%.

### 3.6 Analisis Efisiensi Belanja

Analisis efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil dari analisis efisiensi belanja ini bersifat relatif dan tidak absolut. Berikut adalah hasil perhitungannya:

Tabel 8. Perhitungan Tingkat Efisiensi Belanja Kota Depok Tahun Anggaran 2020 - 2022

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2020	Rp 3,786,740,736,807.00	Rp 3,231,267,376,079.00	85.33	efisien
2021	Rp 3,676,759,990,653.00	Rp 3,267,620,863,110.00	88.87	efisien
2022	Rp 4,085,789,603,733.00	Rp 3,614,127,822,783.00	88.46	efisien
Rata - Rata			87.55	efisien

Berdasarkan tabel tingkat efisiensi belanja selama 2020-2022 dapat dikatakan efisien. Pada tahun 2020, rata-rata efisiensi belanja mencapai 85,33%, pada tahun 2021 meningkat menjadi 88,87%, dan pada tahun 2022 tetap tinggi dengan rata-rata 88,46%. Jumlah rata-rata rasio efisiensi belanja selama periode tersebut adalah sebesar 87,55%.

### 3.7 Pembahasan

Berdasarkan tabel yang disajikan, selisih realisasi pendapatan Kota Depok menunjukkan peningkatan yang signifikan selama periode 2020-2022. Pada tahun 2020, selisih antara realisasi dan anggaran pendapatan adalah sebesar Rp. 115.182.556.336,00 atau 103,69%. Selisih ini meningkat pada tahun 2021 menjadi Rp. 176.397.682.855,00 atau 105,48%, sebelum menurun sedikit pada tahun 2022 menjadi Rp. 70.488.129.694,00 atau 101,96%.

Pertumbuhan pendapatan yang positif ini, sebesar 4,94% dari tahun 2020 ke 2021 dan 7,91% dari tahun 2021 ke 2022, menunjukkan bahwa Kota Depok berhasil meningkatkan pendapatannya secara signifikan setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola dan meningkatkan sumber-sumber pendapatannya, meskipun ada fluktuasi pada selisih realisasi pendapatan.

Efektivitas PAD Kota Depok selama periode yang sama juga menunjukkan performa yang baik. Pada tahun 2020, rasio efektivitas PAD mencapai 113,57%. Angka ini sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 113,88%, meskipun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 106,43%. Meskipun ada penurunan pada tahun 2022, rasio efektivitas yang berada di atas 100% setiap tahun menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah dianggarkan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

Selama periode 2020-2022, analisis varian belanja daerah menunjukkan penggunaan anggaran yang efisien oleh pemerintah Kota Depok. Pada tahun 2020, pemerintah menggunakan 85,33% dari jumlah yang dianggarkan. Persentase ini meningkat menjadi 88,87% pada tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 88,46% pada tahun 2022. Tingkat penggunaan anggaran ini mencerminkan manajemen belanja yang cukup baik oleh pemerintah daerah. Penggunaan anggaran yang konsisten menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola belanja sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2022.

Pertumbuhan belanja daerah Kota Depok juga menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2021, pertumbuhan belanja mencapai rata-rata 1,1%, dan pada tahun 2022, pertumbuhan ini meningkat secara signifikan menjadi 9,48%, dengan total pertumbuhan sebesar 10,60% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan perkembangan ekonomi, meskipun harus tetap diwaspadai agar tidak melebihi kemampuan pendapatan daerah. Pertumbuhan belanja yang signifikan pada tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan publik, namun perlu pengawasan agar tidak berdampak negatif terhadap keseimbangan anggaran.

Efisiensi belanja Kota Depok selama periode 2020-2022 dapat dikatakan efisien, dengan rata-rata efisiensi yang cukup tinggi. Pada tahun 2020, tingkat efisiensi belanja mencapai 85,33%. Angka ini meningkat menjadi 88,87% pada tahun 2021 dan sedikit menurun menjadi 88,46% pada tahun 2022. Rata-rata rasio efisiensi belanja selama tiga tahun tersebut adalah sebesar 87,55%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang hemat dan sesuai dengan perencanaan. Tingkat efisiensi ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah mampu mengendalikan pengeluaran dan menggunakan anggaran secara optimal, sehingga mencapai hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan data yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Depok telah menunjukkan kinerja keuangan yang positif selama periode 2020-2022. Beberapa poin penting dari analisis ini adalah a) Realisasi pendapatan Kota Depok meningkat signifikan, dengan selisih yang besar dari anggaran. Meskipun terdapat fluktuasi, keseluruhan peningkatan menunjukkan bahwa pemerintah mampu meningkatkan sumber-sumber pendapatannya. b) Pemerintah daerah telah berhasil meningkatkan pertumbuhan pendapatan secara signifikan. Pertumbuhan pendapatan yang positif, mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang ada dengan baik. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan oleh pemerintah Kota Depok dalam mengoptimalkan pendapatan daerah, yang sangat penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. c) Rasio efektivitas PAD Kota Depok selama tiga tahun terakhir selalu berada di atas 100%, dengan nilai tertinggi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan sesuai dengan target yang dianggarkan, mencerminkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan PAD. d) Penggunaan anggaran oleh pemerintah Kota Depok juga menunjukkan efisiensi. Persentase penggunaan anggaran tetap stabil, dengan sedikit penurunan pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan manajemen belanja yang konsisten dan sesuai dengan perencanaan anggaran. e) Pertumbuhan belanja daerah meningkat setiap tahunnya, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2022. Meskipun hal ini mencerminkan respons pemerintah terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, perlu perhatian untuk menjaga keseimbangan dengan pendapatan daerah. f) Rata-rata rasio efisiensi belanja selama periode 2020-2022 menunjukkan angka yang tinggi, yaitu 87,55%. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan hemat dan optimal, sehingga hasil yang dicapai maksimal dengan sumber daya yang minimal.

#### Referensi

- Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 - 2018 (Studi Kasus Pada BPKAD Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 4(2), 1113–1132.
- BPK. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130903/permendagri-no-33-tahun-2019>
- Depok, P. K. (2024, Mei). *Visi dan Misi Kota*. Diambil kembali dari Pemerintahan: <https://www.depok.go.id/visi-misi>
- Fasha, R. N. (2022). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Samarinda*. Samarinda: 2023.
- Kuangan, P., & Nomor, U. (2023). Salina, N.<sup>1</sup>. *Oxford English Dictionary*. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Kusufi, A. H. (2012). *Teori, Konsep dan Aplikasi : Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi, M. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Ketiga ed.). Yogyakarta: Upp Stim Ykpn.
- Lembaran, T., Lembaran, T., Pemerintah, P., Nomor, P. U., Lembaran, T., Republik, N., Lembaran, T., & Daerah, K. (2024). *Berita Negara*. 799.

Mahmudi, M., & Sallama, N. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

PPID. (2024, 05 24). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 2020 - 2022*. Retrieved from Ringkasan Laporan Keuangan 2020 - 2022: <https://ppid.depok.go.id/>

Rasyid. (2014). No Title. *Pontificia Universidad Catolica Del Peru*, 8(33), 44.

Setiani, T., & Nurul Madila, R. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018. *Jurnal Akuntansi*, 12(02), 103–111. <https://ejournal.ulbi.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/615>

Shaladin Hernandi, D. A., Deviyanti, D. R., & Ratna Sari, W. I. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Provinsi Kalimantan Timur. *JIAM (Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman)*, 7(2), 1–12. <http://repositori.utu.ac.id/id/eprint/78/1/BAB 1-V.pdf>